

BAB XII

BIDANG SARANA DAN PRASARANA KOTA

12.1. UMUM

Propinsi DKI Jakarta yang merupakan kota metropolitan, merupakan tempat yang menarik baik sebagai tempat usaha atau kerja, maupun tempat tinggal. Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan terbukanya lapangan usaha menyebabkan pertumbuhan penduduk metropolitan Jakarta meningkat secara berarti dengan konsekuensi pada kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan untuk memperkuat fungsi internal dan eksternal kota. Persoalan utama yang dihadapi akibat perkembangan kota yang pesat adalah (1) kurang memadainya sarana pengendali banjir, (2) bencana banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi langganan, yang disebabkan permukaan tanah Jakarta seluas 40% datarannya relatif rendah (3) meluasnya permukiman kumuh, (4) meningkatnya kemacetan lalu lintas dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum, (5) kurangnya ketersediaan utilitas perkotaan, (6) kurang lengkapnya instrumen penataan kota, serta (7) kurang memadainya pengendalian pemanfaatan ruang kota.

Untuk mewujudkan kota Jakarta yang indah, sehat dan nyaman, baik sebagai pusat kegiatan ekonomi maupun pemukiman, pemerintah Propinsi DKI Jakarta dihadapkan pada kendala kemampuan manajerial serta terbatasnya lahan dan pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sarana dan prasarana publik yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, jumlah penduduk yang besar dan angka komuter yang tinggi menyebabkan tuntutan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan semakin meningkat. Kondisi geografis Jakarta yang terletak di dataran rendah dan menjadi muara dari tiga belas sungai juga menuntut upaya pengembangan sarana pengendalian banjir yang memadai. Penyediaan hunian dan fasilitas pendukungnya harus diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin melalui perbaikan lingkungan pemukiman dan kawasan kumuh serta pembangunan rumah susun sederhana.

Sejalan dengan upaya pengembangan kota, partisipasi masyarakat Propinsi DKI Jakarta dalam penataan ruang terus ditingkatkan. Penyediaan data dan informasi tata ruang Propinsi DKI Jakarta juga harus lengkap, menyeluruh dan didukung oleh sistem informasi pemukiman, pertanahan dan bangunan yang akurat, mutakhir, efisien, dan efektif. Sejak dini penataan ruang perlu memperhatikan kaidah teknis, ekonomis, dan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan umum. Penataan ruang harus memperhatikan dinamika masyarakat dengan instrumen peraturan yang lengkap dan memadai untuk mengantisipasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang. Upaya pemberdayaan, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam ikut memelihara berbagai sarana prasarana kota sebagai aset pemerintah daerah perlu makin ditingkatkan.

Bidang Sarana dan Prasarana Kota terdiri atas 6 fungsi, yaitu : Kelengkapan Kota, Tata Air, Perhubungan, Perumahan dan Pemukiman dan Tata Ruang serta Tata Bangunan. Masing-masing fungsi memiliki permasalahan spesifik yang akan di uraikan dibawah ini.

Kelengkapan Kota

1. Jaringan utilitas kota belum tertata secara optimal.
2. Belum meratanya penerangan umum terutama pada kawasan kumuh dan pinggiran
3. Belum meratanya pelayanan air bersih
4. Belum meratanya pelayanan air limbah
5. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana kelengkapan kota

Tata Air

1. Belum terbangunnya sistem makro pengendali banjir
2. Masih belum tertanganinya lokasi genangan air pada waktu musim hujan di berbagai wilayah kota.
3. Terjadinya penyempitan dan pendangkalan sungai.
4. Banyaknya pemukiman liar di bantaran kali

5. Kurang memadainya pemeliharaan dan pengelolaan sarana pengendali banjir
6. Tidak mempunya sistem drainase di Propinsi DKI Jakarta menyalurkan air ke tempat penampungan/pembuangan
7. Faktor kesadaran/disiplin masyarakat dalam memelihara drainase lingkungan yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir
8. Keterbatasan lahan untuk drainase dan pembebasan lahan yang memerlukan biaya tinggi
9. Hulu daerah aliran sungai berada diluar kendali Pemerintah Propinsi DKI Jakarta
10. Kurangnya pengawasan dan tegasnya penegakan hukum

Perhubungan

1. Kurangnya sarana transportasi umum dan tingginya mobilitas penumpang di Propinsi DKI Jakarta
2. Meningkatnya jumlah penggunaan kendaraan pribadi
3. Meningkatnya jumlah lokasi rawan kemacetan.
4. Meningkatnya jumlah kematian akibat kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir
5. Tidak seimbangya laju pertumbuhan kendaraan dengan ruas jalan.
6. Sulit dan mahalnya pembebasan lahan untuk jalan.
7. Masih minimnya transportasi laut di Kepulauan Seribu
8. Disiplin pengguna jalan masih rendah
9. Kurangnya keamanan pengguna angkutan umum
10. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait

Perumahan dan Permukiman

1. Meningkatnya kebutuhan perumahan terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2. Sulit dan mahalnya pembebasan lahan untuk pembangunan rumah susun
3. Kurangnya fasilitas pendukung kawasan permukiman padat dan lingkungan rumah susun

4. Rendahnya kesadaran penghuni rumah susun sederhana dalam memenuhi kewajibannya
5. Rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga banyak masyarakat miskin tinggal di lokasi permukiman kumuh.
6. Belum optimalnya penataan permukiman di pulau yang padat penduduknya.
7. Rendahnya tingkat penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan munculnya permukiman kumuh di daerah aliran sungai (DAS)
8. Pemerintah kurang siap dalam mengantisipasi kecepatan pertumbuhan fisik lingkungan kumuh dan penataan permukiman kumuh

Tata Ruang

1. Belum memadainya instrumen implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah 2010
2. Belum memadainya pemahaman masyarakat terhadap penataan ruang
3. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang
4. Kurangnya sosialisasi penggunaan ruang kota
5. Banyaknya kawasan kumuh yang belum tertata
6. Belum terpadunya penataan ruang dengan pengelolaan lingkungan hidup
7. Terbatasnya ruang usaha bagi sektor informal
8. Belum optimalnya pelayanan masyarakat serta pengawasan dan penertiban bangunan

Tata Bangunan

1. Belum memadainya instrumen pendukung mekanisme penataan bangunan dan gedung pemda
2. Belum mencukupinya sarana bangunan dan gedung Pemda

12.2. ARAH KEBIJAKAN

Seiring dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan kota yang semakin pesat, perlu dilakukan pembangunan sarana dan prasarana kota guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menunjang berbagai aktivitas

masyarakat dan pemerintah. Berbagai upaya pembangunan untuk bidang sarana dan prasarana kota tersebut dituangkan dalam arah kebijakan pemerintah daerah sesuai fungsinya, yang meliputi :

Kelengkapan Kota

Membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan dan tempat umum, serta jaringan utilitas yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat

Tata Air

Melanjutkan pembangunan sarana pengendali banjir dan drainase kota, sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya.

Perhubungan

Meningkatkan kinerja sistem transportasi, pos dan telekomunikasi melalui pemanfaatan secara optimal jaringan transportasi, pos dan telekomunikasi serta perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan.

Perumahan dan Permukiman

Membangun fasilitas perumahan dan permukiman, dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau.

Tata Ruang

Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan partisipatif berdasarkan prinsip adil, efisien dan berkelanjutan

Tata Bangunan

Mewujudkan penataan bangunan dan gedung Pemda yang berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat

12.3. STRATEGI BIDANG SARANA DAN PRASARANA KOTA

Kelengkapan Kota

Meningkatkan fasilitas penerangan jalan dan jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, gas dan air) terutama di daerah padat permukiman dan tempat umum, meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau pertamanan sebagai sarana interaksi masyarakat dan mendukung keindahan kota, serta meningkatkan pelayanan air limbah dan air bersih kepada masyarakat dan dunia usaha.

Tata Air

Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait dalam menanggulangi banjir, mengoptimalisasi saluran drainase yang ada serta memperbanyak situ atau waduk untuk menampung air hujan atau air kiriman dari daerah lain dan meningkatkan pengawasan serta ketertiban di bantaran kali, melaksanakan pelebaran sungai dan pengerukan kali serta terus melaksanakan pembangunan Banjir Kanal Timur dengan pendekatan pada Pemerintah Pusat.

Perhubungan

Mengoptimalkan ruas jalan dan jembatan yang ada termasuk fasilitas pejalan kaki (pedestrian, halte, zebra cross, jembatan penyeberangan orang), memperbaiki kualitas pelayanan dan pengembangan angkutan umum massal, koordinasi dengan daerah-daerah berbatasan, serta meningkatkan pelayanan angkutan dari dan ke Kepulauan Seribu.

Perumahan dan Permukiman

Mengoptimalkan pembangunan rumah susun sederhana, menata permukiman padat di Kepulauan Seribu, mengantisipasi pertumbuhan fisik lingkungan kumuh dan permukiman di bantaran sungai.

Tata Ruang

Meningkatkan dan melengkapi instrumen penataan ruang, meningkatkan kerjasama penataan ruang antar daerah dengan kabupaten dan kota se-Bodetabek, meningkatkan peranserta masyarakat dalam penataan

ruang dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan berkelanjutan

Tata Bangunan

Menyusun master plan penataan gedung Pemda, melaksanakan peningkatan pembangunan sarana gedung Pemda, mengoptimalkan aset-aset yang ada secara efisien dan efektif. Meningkatkan koordinasi lintas sektor/unit terkait di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan para pelaku jasa konstruksi

12.4. MATRIKS BIDANG SARANA DAN PRASARANA KOTA

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Kelengkapan Kota			
Membangun dan mengembangkan fasilitas penerangan jalan dan tempat umum, serta jaringan utilitas yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung serta menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat	Meningkatkan fasilitas penerangan jalan dan jaringan utilitas (listrik, telekomunikasi, gas dan air) terutama di daerah padat permukiman dan tempat umum, meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau pertamanan sebagai sarana interaksi masyarakat dan mendukung keindahan kota, serta meningkatkan pelayanan air limbah dan air bersih kepada masyarakat dan dunia usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas 2. Penerangan Jalan dan Tempat Umum 3. Pengembangan Pelayanan Air Limbah 4. Pengembangan Pelayanan Air Bersih 	<ol style="list-style-type: none"> a) Tertatanya jaringan listrik, gas, air bersih serta air limbah a) Bertambahnya jumlah dan kualitas titik lampu penerangan di jalan dan tempat umum a) Meningkatnya pemeliharaan dan pengembangan jaringan air limbah buangan pabrik, pertokoan, restoran, dll a) Meningkatnya mutu pelayanan air bersih b) Meningkatnya jumlah pelanggan air bersih b) Terkendalinya penggunaan air tanah oleh dunia usaha dan masyarakat c) Meningkatnya pemenuhan air baku untuk air bersih d) Menurunnya tingkat kebocoran air bersih
Tata Air			
Melanjutkan pembangunan sarana pengendali banjir dan drainase kota, sehingga ancaman bencana banjir dan genangan air dapat dikurangi, baik banyaknya lokasi maupun sebarannya	Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait dalam menanggulangi banjir, mengoptimalisasi saluran drainase yang ada serta memperbanyak situ atau waduk untuk menampung air hujan atau air kiriman dari daerah lain dan meningkatkan pengawasan serta ketertiban di bantaran kali, melaksanakan pelebaran sungai dan pengerukan kali serta terus melaksanakan pembangunan Banjir Kanal Timur dengan pendekatan pada Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian Banjir 2. Peningkatan Drainase Kota 	<ol style="list-style-type: none"> a) Berkurangnya titik rawan genangan banjir b) Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pengendalian banjir : saluran/kali, waduk/situ, pompa air dan pintu air c) Meningkatnya kapasitas aliran saluran/kali dan penampungan waduk/situ a) Tertatanya rencana induk sistem drainase yang efektif dan efisien b) Meningkatnya kualitas sarana drainase kota c) Meningkatnya frekuensi sosialisasi kesadaran masyarakat terhadap drainase lingkungan setempat d) Meningkatnya kapasitas pengaliran saluran penghubung dan saluran mikro/permukiman

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Perhubungan			
Meningkatkan kinerja sistem transportasi, pos dan telekomunikasi melalui pemanfaatan secara optimal jaringan transportasi, pos dan telekomunikasi serta perbaikan kuantitas dan kualitas pelayanan	Mengoptimalkan ruas jalan dan jembatan yang ada termasuk fasilitas pejalan kaki (pedestrian, halte, zebra cross, jembatan penyeberangan orang), memperbaiki kualitas pelayanan dan pengembangan angkutan umum massal, koordinasi dengan daerah-daerah berbatasan, serta meningkatkan pelayanan angkutan dari dan ke Kepulauan Seribu	<p>1. Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan</p> <p>2. Pengembangan Sarana dan Fasilitas Perhubungan</p> <p>3. Pengembangan Pelayanan Angkutan Umum</p>	<p>a) Meningkatnya kualitas jalan di daerah permukiman</p> <p>b) Tersedianya jalan arteri untuk kawasan permukiman dan perdagangan</p> <p>c) Meningkatnya ruas jalan dan pelebaran jalan sesuai perkembangan volume kendaraan</p> <p>d) Meningkatnya fasilitas trotoar untuk pejalan kaki</p> <p>a) Menurunnya tingkat kepadatan di jalan arteri</p> <p>b) Menurunnya tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas</p> <p>c) Bertambahnya sarana pengaturan lalu lintas</p> <p>d) Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum</p> <p>e) Terkendalnya penggunaan frekuensi radio dan tertatanya jaringan pos secara baik</p> <p>a) Meningkatnya frekuensi pengawasan pelayanan angkutan umum</p> <p>b) Tersedianya angkutan umum massal</p> <p>c) Meningkatnya kedisiplinan awak angkutan umum dan masyarakat pengguna jasa angkutan umum</p> <p>d) Tersedianya angkutan penumpang dan barang dari dan ke Kepulauan Seribu</p>
Perumahan dan Permukiman			
Membangun fasilitas perumahan dan permukiman, dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau	Mengoptimalkan pembangunan rumah susun sederhana, menata permukiman padat di Kepulauan Seribu, mengantisipasi pertumbuhan fisik lingkungan kumuh dan permukiman di bantaran sungai	<p>1. Pengembangan Perumahan</p> <p>2. Pengembangan Lingkungan Permukiman</p>	<p>a) Semakin seimbangya ketersediaan dan kebutuhan perumahan khususnya rumah susun bagi rakyat kecil</p> <p>b) Meningkatnya tingkat hunian rumah susun sesuai peruntukannya</p> <p>c) Meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan hunian layak</p> <p>a) Tertatanya lingkungan permukiman terutama di lingkungan rumah susun</p> <p>b) Meningkatnya frekuensi pengawasan pengembangan lingkungan permukiman</p> <p>c) Tertatanya sistem penghijauan permukiman</p> <p>d) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat</p>

Arah Kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		3. Pelayanan Perumahan dan Permukiman	a) Meningkatnya jumlah fasilitas permukiman yang layak b) Menurunnya jumlah permukiman di lokasi ilegal
Tata Ruang			
Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dan partisipatif berdasarkan prinsip adil, efisien dan berkelanjutan	Meningkatkan dan melengkapi instrumen penataan ruang, meningkatkan kerjasama penataan ruang antar daerah dengan kabupaten dan kota se-Bodetabek, meningkatkan peranserta masyarakat dalam penataan ruang dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten dan berkelanjutan	1. Perencanaan Ruang 2. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Penataan dan Pengawasan Bangunan 4. Pengembangan Kawasan Khusus/Strategis	a) Semakin lengkapnya instrumen penataan ruang b) Meningkatnya luas kawasan yang tertata baik c) Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam penataan ruang kota d) Meningkatnya green-ratio, water ratio dan road ratio a) Tersedianya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memadai b) Tersedianya sistem manajemen pertanahan yang efisien dan efektif a) Meningkatnya kinerja pelayanan perijinan kepada masyarakat b) Tersedianya sistem informasi manajemen pelayanan perijinan c) Tersedianya peraturan tentang penataan dan pengawasan bangunan d) Terlaksananya penertiban terhadap pelanggar ketentuan yang berlaku a) Terlaksananya penataan kawasan khusus/strategis b) Meningkatnya aktivitas masyarakat di kawasan khusus/strategis c) Bertambahnya sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan
Tata Bangunan			
Mewujudkan penataan bangunan dan gedung Pemda yang berkualitas dan handal untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat	Menyusun master plan penataan gedung Pemda, melaksanakan peningkatan pembangunan saran gedung Pemda, mengoptimalkan aset-aset yang ada secara efisien dan efektif. Meningkatkan koordinasi lintas sektor/unit terkait di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dan para pelaku jasa konstruksi	1. Penataan bangunan dan gedung Pemda	a) Terpenuhinya kebutuhan sarana gedung Pemda secara bertahap b) Terciptanya tata lingkungan yang baik pada kawasan-kawasan potensial c) Terselenggaranya tertib pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan gedung Pemda d) Meningkatnya kualitas hasil pelaksanaan pembangunan, perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan bangunan